

SIARAN PERS

Proses Rekrutmen Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) 2026 “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”

Nomor: 001/HMS.ST/SP/V/2026

Bawaslu Sulteng – Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 sebagai bagian dari program prioritas nasional dalam mempersiapkan ekosistem pengawasan pemilu menuju Pemilu 2029 yang berintegritas dan bermartabat.

Pelaksanaan program tersebut ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 91/PM.05/K1/05/2026 yang ditandatangani pada 4 Mei 2026 dan menggantikan Keputusan Ketua Bawaslu sebelumnya Nomor 73/PM.05/K1/04/2026.

Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) merupakan upaya penguatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis Bawaslu dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Melalui program ini, Bawaslu mendorong peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu berperan aktif dalam melakukan pencegahan pelanggaran, pengawasan tahapan pemilu, serta penguatan gerakan pengawasan partisipatif di lingkungan masing-masing.

Peserta P2P Tahun 2026 merupakan peserta undangan yang berasal dari alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawas Partisipatif tahun 2018–2024 yang masih aktif, pemilih pemula dan pemilih muda, pelajar SLTA/ sederajat, mahasiswa, hingga pengurus organisasi dan komunitas. Peserta juga diprioritaskan berasal dari komunitas aktif, memiliki pengalaman dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan, serta memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen, kelompok disabilitas, kelompok rentan, dan keberagaman.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026, pelaksanaan P2P di wilayah Sulawesi Tengah tetap dilaksanakan secara daring dengan target 40 peserta di setiap kabupaten/kota. Skema pelaksanaan dilakukan secara virtual dengan pengalihan dukungan anggaran transportasi dan uang makan menjadi pengganti pulsa atau kuota internet peserta.

Berdasarkan data peserta yang telah ditetapkan, jumlah peserta P2P Tahun 2026 di wilayah Sulawesi Tengah tersebar di 13 kabupaten/kota dengan komposisi yang memperhatikan keterwakilan gender dan inklusivitas. Dengan rincian keterwakilan sebagai berikut:



No	Kab/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Peserta Disabilitas
1	Kota Palu	25	15	5
2	Kab. Donggala	20	20	-
3	Kab. Sigi	25	15	-
4	Kab. Parigi Moutong	22	18	-
5	Kab. Toli-Toli	22	18	-
6	Kab. Buol	14	26	-
7	Kab. Poso	12	28	-
8	Kab. Tojo Una-Una	21	19	-
9	Kab. Banggai	15	25	-
10	Kab. Banggai Kepulauan	27	13	2
11	Kab. Banggai Laut	30	10	-
12	Kab. Morowali	11	29	-
13	Kab. Morowali Utara	17	23	-

Secara keseluruhan, komposisi peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di wilayah Sulawesi Tengah menunjukkan keterlibatan yang beragam dari berbagai unsur masyarakat. Sejumlah daerah tercatat memiliki keterwakilan perempuan yang cukup dominan, seperti Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara itu, Kota Palu dan Kabupaten Banggai Kepulauan juga melibatkan peserta disabilitas sebagai bagian dari komitmen terhadap pengawasan partisipatif yang inklusif.

Komposisi peserta tersebut menjadi gambaran komitmen Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam membuka ruang partisipasi yang luas bagi perempuan, kelompok rentan, pemilih muda, serta komunitas masyarakat dalam penguatan demokrasi dan pengawasan Pemilu menuju Pemilu 2029 yang bermartabat, inklusif, dan demokratis.

Pelaksanaan P2P Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Desember 2026 di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Adapun materi pembelajaran meliputi teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, teknis pelaporan dugaan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas, hingga pengawasan partisipatif berbasis digital.

Metode pembelajaran dilaksanakan secara bertahap melalui pembelajaran mandiri menggunakan video audio visual dan e-modul berbasis website, penyusunan catatan kritis, diskusi bersama narasumber dan fasilitator internal Bawaslu, hingga pelaksanaan pre test, post test, serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Peserta yang mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran akan memperoleh sertifikat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Sementara peserta yang belum menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan tetap akan mendapatkan surat keterangan keikutsertaan dari panitia penyelenggara.

Palu, 8 Mey 2026
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

ttd

Nasrun

HumasBawasluSulteng